

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor Pemerintahan merupakan wadah aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tempat wakil rakyat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prita Shintania, 2012). Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadikan/akan menjadi kekayaan milik negara yang diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara). Dapat disimpulkan bahwa Kantor Pemerintahan merupakan bangunan yang dimiliki oleh negara yang berfungsi untuk keperluan pelayanan masyarakat negara dan ruang kerja bagi para pegawai negeri.

Tren desain kantor sudah mulai berkembang seiring berkembangnya kreativitas manusia. Imej kantor yang seperti kaku, formal, dan menegangkan mulai diubah perlahan dengan desain ruang kantor yang semakin mengikuti kenyamanan pengguna dengan pengayaan yang menjadi lebih luwes, informal, tapi masih mengikuti fungsi ruang kantor yang dibutuhkan dan tetap terasa profesional. Seperti apa yang dikatakan oleh General Manager JustCo Jakarta, Michael Sim menyebutkan bahwa ruang kantor memiliki hubungan langsung dengan produktivitas pekerjanya. Oleh karena itu, ruang kantor perlu dirancang sedemikian rupa agar pekerja tetap nyaman berada di kantor dan menjadi lebih produktif. Seperti yang disampaikan oleh Mutiara Nabila (2020), tempat kerja modern yang dirancang dengan baik dan penuh pertimbangan adalah tempat yang menyediakan tingkat privasi yang berbeda untuk penggunanya, mulai dari ruang kantor pribadi, bilik telepon, dan ruang pertemuan hingga rencana ruang komunal terbuka dengan peluang kolaborasi.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten dan bertempat di Gedung

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Desain awal ruang kantor di SKPD terpadu ini dibuat sama untuk setiap lantai walaupun penggunaannya berbeda tugas pokok dan fungsinya. Dalam perjalanan waktu, beberapa OPD berubah struktur organisasinya sehingga merubah tugas pokok dan fungsinya dan merubah pula personil yang bekerja pada ruang kantor tersebut. Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berubah dengan menghilangkan struktur Eselon III dan Eselon IV menjadi fungsional tertentu yaitu analisis kebijakan sehingga tata cara kerja, tugas dan fungsinya menjadi berbeda. Karena kebijakan yang sudah berubah ini membuat layout ruang kerja kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan harus menyesuaikan dengan tata kerja organisasi yang baru.

Ruang kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memiliki imej kaku dan formal. Saat ruang kantor pemerintah tersebut berganti pengguna atau struktur organisasi perangkat daerahnya berubah sehingga tugas pokok dan fungsinya berbeda, desain ruangnya tidak serta merta diganti, masih berdesain yang sama. Penambahan sekat, furniture dan perlengkapan elektronik pendukung di ruang kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan belum memperhitungkan tugas pokok dan fungsi yang baru, membuat interior ruang kerja terkesan penuh dan furnitur yang asal disediakan. Desain kantor seperti ini membuat banyak ruangan pegawai tidak memenuhi standar berdasarkan standar kenyamanan penggunaannya.

Dari yang dikatakan oleh Prita (dalam Imaji - vol. 1 no. 4, 2021), Kantor Pemerintahan memerlukan tuntutan khusus, yakni wadah yang berperan sebagai simbol filosofis, fungsional, dan teknis, serta fungsi keterbukaan sebagai simbol wakil dari masyarakat suatu daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka meningkat pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Maka dari itu alasan memilih perancangan ulang pada kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan ruang kerja pada kantor pemerintahan yang menarik, efisien, lebih memadai, sesuai dengan kenyamanan para penggunanya sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan penggunanya dengan tetap mengikuti standar sarana dan prasarana peraturan pemerintah yang berlaku. Manfaat dari ruang kerja yang sesuai dengan para pengguna ini bisa membuat lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan produktif lagi daripada sebelumnya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut ini merupakan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang dan hasil analisa atau observasi:

### a. Organisasi Ruang dan Layout

- **Ruang Utama**

- Alur sirkulasi yang kurang jelas sehingga ruangan menjadi kurang fungsional.
- Penempatan furnitur ruang kerja staff yang belum tertata sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Luas ruangan pejabat belum sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan pengguna serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018.
- Hubungan antar ruang pada beberapa ruang kerja pejabat eselon II, IV dan pejabat fungsional tertentu belum mempertimbangkan perubahan tata kerja organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022.
- Suasana ruangan yang kaku dan penataan layout ruangan dengan kesan hierarki atau berjenjang.

- **Ruang Penunjang**

- Layout penempatan ruang *pantry* yang terpisah di antara area lift sehingga alur aktivitas di ruang *pantry* tidak maksimal.
- Penempatan toilet di ruang kepala biro tidak sesuai karena berada dibelakang meja kerja dan bisa langsung terlihat saat membuka pintu masuk ke ruangan.

- Mushola dan tempat wudhu tidak memisahkan area pria dan wanita, lalu tidak ada penghalang dengan area luar sehingga bagian dalam mushola dapat terlihat dari area luar.

## **b. Persyaratan umum**

### **• Fasilitas**

- Fasilitas seperti furnitur pada beberapa ruang kerja pengguna yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten.
- Variasi furnitur yang belum mencukupi kegiatan dalam kantor.
- Ruang mushola yang kurang dalam menyediakan perlengkapan ibadah dan furnitur yang dijadikan untuk penunjang beribadah.
- Fasilitas di ruang *pantry* yang tidak lengkap dan tidak memadai atau kurang layak.
- Ruang gudang masih belum memadai untuk menyimpan barang logistik milik Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, menyebabkan kelebihan kapasitas yang membuat barang-barang menjadi tidak teratur dan ada yang ditaruh di sekitar koridor dan membuat sirkulasi jalan pengguna dan tamu jadi terganggu.

### **• Pencahayaan**

- Kurangnya pencahayaan pada beberapa area pojok tempat kerja staff yang jauh dari paparan sinar matahari lewat jendela dan ruang pendukung yang tidak sesuai standar ruang sehingga kurang menunjang aktivitas bekerja. Standar lux ruang kantor adalah 350 lux.
- Pencahayaan alami pada ruang rapat karena jendela kaca yang terhalang papan presentasi.
- Pencahayaan pada ruang mushola yang redup dikarenakan berada di pojok bangunan dan tidak memiliki bukaan cahaya ke luar sehingga hanya mengandalkan cahaya buatan dari lampu.

### **• Penghawaan**

- Sirkulasi udara di area mushola belum memadai karena tidak ada ventilasi udara.

- Area *pantry* yang memiliki *exhaust fan* tetapi bersebelahan dengan tempat pembuangan angin panas *air conditioner*.

- **Keamanan**

- Di beberapa area masih belum dilengkapi dengan CCTV sehingga bisa menghambat upaya pencegahan kejahatan yang mungkin terjadi.
- Belum tersedianya fasilitas pencegahan kebakaran di beberapa area dalam kantor, hanya ada 2 unit APAR di koridor.

- **Akustik**

- Pengaturan tingkat kebisingan dibutuhkan pada ruang rapat karena pintu masuk berhadapan dengan lift akses ke lantai 7 kantor.
- Mushola yang menjadi ruang ibadah terbuka lebar sehingga kebisingan berasal dari luar ruangan bisa mengganggu ketenangan ibadah yang berlangsung.
- Kebisingan yang berasal dari koridor dan ruang kerja staff bisa mengganggu ketenangan saat bekerja bisa diminimalkan dengan menerapkan pemakaian karpet atau panel khusus pada lantai, ceiling, ataupun dinding ruangan.

- **Sign**

- Tidak ada petunjuk menuju area kerja setelah keluar dari lift sehingga menyebabkan kesulitan untuk menemukan ruang untuk pengunjung baru kantor.
- Desain penanda yang ada di setiap ruang kurang informatif dan kurang menarik perhatian mata sehingga tidak berfungsi optimal.

### c. **Konsep Visual**

- **Konsep Bentuk**

Terlihat visual bentuk pada ruangan yang masih datar, tidak ada permainan visual bentuk pada ceiling, dinding, atau lantai di semua ruang.

- **Konsep Warna**

Di dominasi warna putih yang tidak menunjukkan identitas bangunan yang dimiliki oleh Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten.

- **Konsep Ornamen**

Belum adanya ornamen tertentu di ruang publik seperti lorong lift, resepsionis, atau pun ruang kerja yang menjadi sebuah simbol identitas bangunan atau instansi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil analisa dari identifikasi masalah mendapatkan beberapa rumusan masalah pada perancangan Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara menerapkan konsep open space pada layout kantor pemerintahan?
- b. Bagaimana cara mendesain interior ruang kantor pemerintahan yang menciptakan visualisasi identitas instansi dengan menarik serta nyaman pada kantor pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengguna?
- c. Bagaimana cara menerapkan perancangan ulang interior yang sesuai dengan kantor pemerintahan?

### **1.4 Tujuan Perancangan**

Perancangan ulang ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada didalam interior Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, sehingga dapat menciptakan tempat kerja yang menarik dan nyaman bagi semua pegawainya. Berikut merupakan tujuan dari perancangan Kantor Pemerintahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yaitu:

- a.) Menciptakan kantor pemerintahan dengan ruang kerja yang menarik, efisien, lebih memadai, sesuai dengan kenyamanan para penggunanya, dari segi interior maupun fasilitas yang dapat mengoptimalkan kegiatan penggunanya meskipun tetap mengikuti standar peraturan pemerintah yang berlaku, seperti:
  - Mengolah elemen-elemen interior baik dari segi pencahayaan, warna, bentuk, furnitur, dan visual interior yang mengoptimalkan fungsi pada pengguna dan ruang kerja ataupun ruang pendukung untuk mendukung aktivitas pengguna.
  - Menciptakan sirkulasi, ergonomi, dan fungsional pada seluruh ruang kerja dan ruang pendukung dari kantor pemerintah ini.

### **1.5 Batas Perancangan**

Lingkup perencanaan untuk perancangan ulang Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, yaitu:

- a. Lokasi: Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang-Banten Gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu Lt. 7
- b. Status proyek: Perancangan Ulang (Redesain)
- c. Total luasan: luas lahan adalah 1,680 m<sup>2</sup> dengan jumlah 1 lantai.
- d. Area perancangan terdiri dari area resepsionis, ruang kerja Kepala Biro, ruang sekretaris, ruang kerja pejabat eselon II, ruang kerja pejabat eselon IV, ruang kerja fungsional tertentu, ruang rapat, ruang pantry, mushola, tempat wudhu, dan gudang.

## **1.6 Manfaat**

- a. Mengetahui lebih dalam berbagai karakter ruangan kantor di instansi pemerintahan.
- b. Mengenal kultur pengguna ruang perkantoran dari instansi pemerintah daerah.
- c. Belajar mengeksplor desain dengan tetap mengikuti standar pemerintah yang berlaku.
- d. Memahami standarisasi dan prasarana ruang kantor yang diatur oleh pemerintah.

## **1.7 Metode Perancangan**

Metode yang digunakan untuk perancangan ulang kantor pemerintahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini adalah:

### **a. Wawancara**

Menggunakan metode wawancara dengan melakukan percakapan langsung dengan pegawai PNS yang bekerja di kantor tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk memahami aktivitas dan perilaku dari pengguna dan menjadi acuan desain proyek perancangan ulang ini. Metode lainnya adalah membagikan kuesioner kepada 21 pegawai.

### **b. Survei Lokasi**

Melakukan survei langsung ke lokasi lantai 7 kantor SKPD Terpadu Provinsi Banten yang merupakan tempat bekerja untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten untuk melihat keadaan elemen-elemen interior ruang yang ada sekarang sehingga bisa mengetahui permasalahan pada proyek yang akan dirancang ulang.

### **c. Studi Preseden**

Perancangan yang menjadi acuan perbandingan, yaitu kantor Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Studi Literatur

Mendapatkan literatur dan kajian referensi dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk menunjang acuan desain perancangan.

e. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto dan video setiap ruang dan elemen interior proyek perancangan ulang.

f. Analisis

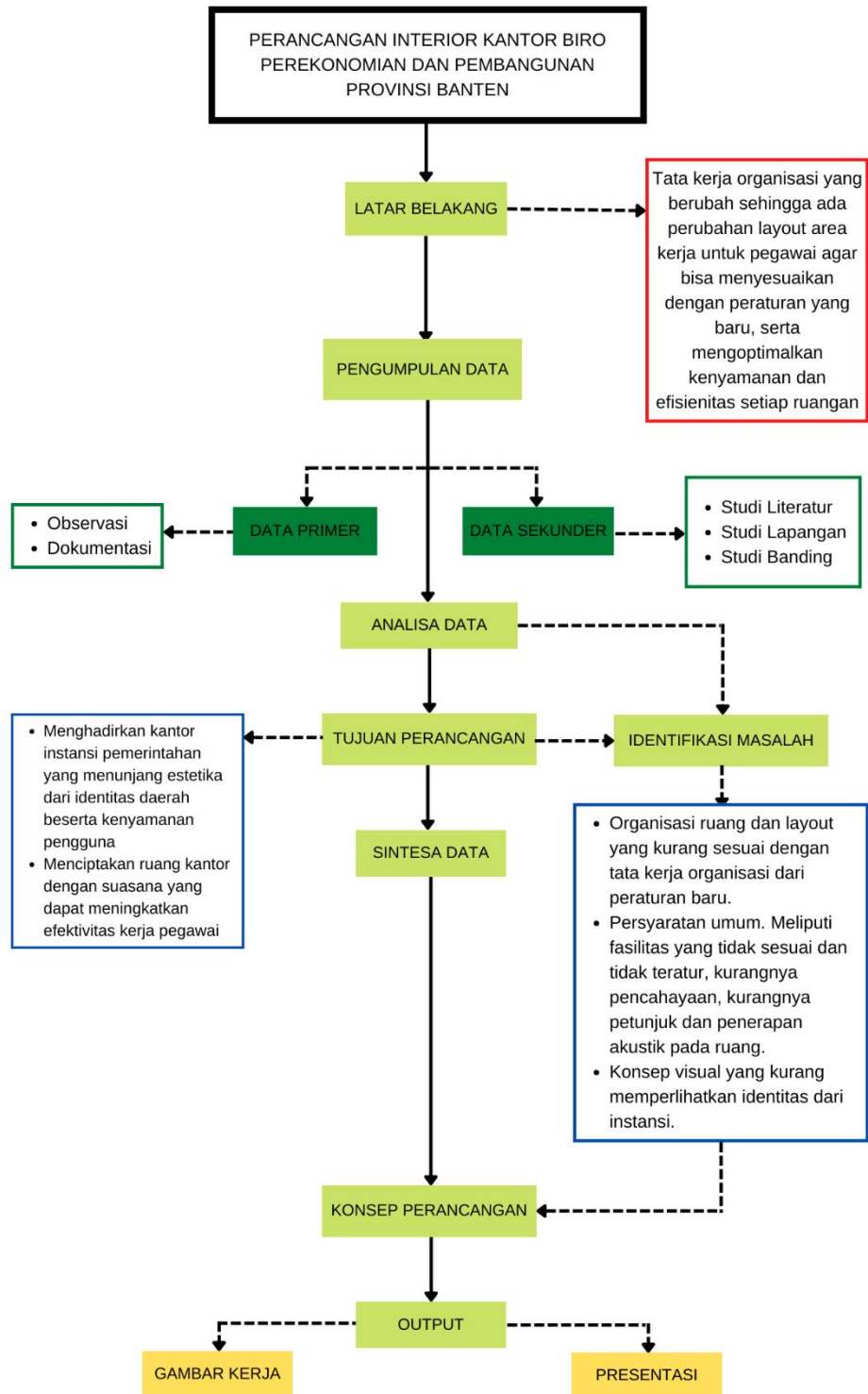
Analisis didapatkan dari hasil wawancara, survei lokasi, studi preseden, dan studi literatur yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan keadaan, permasalahan apa saja, dan kelebihan yang ada di proyek perancangan ulang ini.

g. Konsep Perancangan

Konsep perancangan yang dipakai untuk perancangan ulang ini dengan melihat tren desain kantor yang sedang dipakai pada saat ini, seperti efisien, fungsional, dan mengedepankan kenyamanan pengguna dan kegunaan tiap elemen interior sehingga menciptakan desain yang menarik tetapi tetap mengikuti standar gedung dan ruang dari pemerintah.



## 1.1 Kerangka Berpikir



## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pada penulisan pada proposal perancangan ini antara lain sebagai berikut.

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisi uraian-uraian latar belakang permasalahan dalam perancangan interior Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten. Dari penemuan permasalahan maka dilakukan identifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir serta bahasan masalah yang merujuk pada pemanfaatan perancangan metode yang telah ditentukan dan sistematika pembahasan yang dilakukan.

### **BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN**

Berisi uraian-uraian kajian literatur mengenai perancangan interior Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten disertai analisa data dari lapangan yang sudah diolah.

### **BAB III : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR**

Berisi uraian-uraian tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, layout, bentuk, material, warna, pencahayaan dan penghawaan, keamanan, dan akustik seluruh fasilitas pada bangunan Kantor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten.

### **BAB IV : KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS**

Berisi uraian-uraian mengenai pemilihan denah khusus, konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang dan elemen interior.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian akhir dari penulisan laporan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**